

BAB III

Analisis Peran Organisasi Banteng Muda Indonesia Dalam Proses Suksesi Pemilihan Legislatif Anggota DPRD Kota Yogyakarta 2014

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang bagaimana proses suksesi anggota legislatif dari organisasi sayap partai Banteng Muda Indonesia pada tahun 2014. Penulis akan menganalisis bagaimana proses suksesi dari anggota sayap partai BMI hingga menjadi anggota DPRD kota Yogyakarta pada periode 2014 lalu. Penulis akan melanjutkan penelitian terkait definisi operasional yang ada pada BAB I yang sebelumnya juga telah melakukan pra penelitian untuk melengkapi data pada BAB I. Diharapkan penelitian tersebut dapat melengkapi dan menjawab rumusan masalah.

A. Fungsi partai politik

Sebelum membahas tentang bagaimana proses suksesi pemilu legislatif Kota Yogyakarta tahun 2014, penulis akan membahas tentang fungsi partai politik dimana nanti akan berhubungan dengan proses suksesi pemilu legislatif Kota Yogyakarta tahun 2014. Seperti yang telah di bahas pada bab 1 bahwa partai politik sendiri memiliki 3 fungsi penting yaitu sebagai sosialisasi politik, rekrutmen politik dan partisipasi politik. Disini penulis akan membahas satu-persatu fungsi dari partai politik tersebut.

1. Sosialisasi politik

Sosialisasi politik merupakan proses untuk membentuk sikap dan pandangan politik para anggota masyarakat. Disini peran Banteng Muda Indonesia dalam sosialisasi politik adalah memberikan pengetahuan atau pendidikan politik bagi masyarakat. Selain itu masing-masing sayap partai memiliki kualifikasi untuk setiap anggota, seperti REPDEM atau relawan pejuang demokrasi. Disini Repdem merupakan organisasi sayap partai dari PDIP yang mengutamakan kaum muda diluar pelajar, organisasi ini menjadi wadah bagi kader muda partai untuk menyalurkan aspirasi dan intelektualitas mereka. Selain itu ada juga Taruna Merah Putih. Taruna merah putih juga merupakan organisasi sayap partai dari PDIP. Kualifikasi untuk para anggotanya masih hampir sama dengan REPDEM yaitu berbasis kaum muda diluar mahasiswa atau pelajar. Taruna merah putih merupakan wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomis produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia dilingkungan baik sumberdaya manusia maupun sumber daya alam yang telah ada. Sedangkan untuk BMI sendiri merupakan organisasi sayap partai yang ditujukan untuk kaum muda khususnya para pelajar, disini para anggota BMI bertugas untuk membentuk karakter kaum muda yang militan dan nasionalis yang nantinya dapat menjalankan visi dan misi partai PDIP serta dapat membentuk kader partai yang kompeten dan memiliki potensi. Dimana nantinya dapat melahirkan anggota legislatif yang memiliki

responsibility dan dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada atau sedang berkembang di dalam masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat.

Banyak program-program yang dilakukan oleh BMI demi memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Program-program tersebut biasanya tertuang dalam proker tahunan setiap organisasi. Sosialisasi dari BMI sendiri biasanya tidak jauh-jauh dari program kerja yang dilakukan oleh partai mengingat BMI merupakan salah satu sayap partai PDIP. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Fokky anggota DPRD kota Yogyakarta “Dari partai sendiri di tingkat pimpinan cabang sering mengadakan sosialisasi sampai ke tingkat ranting (tingkat kelurahan). Sosialisasi tersebut membahas tema-tema yang sedang update. Contohnya adalah dengan mengadakan suatu acara pada hari-hari penting nasional yang diperingati di Indonesia seperti saat hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April. Dari partai sendiri mengadakan acara pada 45 ranting mengadakan bedah buku Sarinah, selain menambah pengetahuan di acara tersebut kita juga dapat berdiskusi mengenai isu-isu politik yang sedang berkembang.”

Acara-acara tersebut rutin dilakukan pada setiap momen-momen besar atau hari-hari besar nasional. Selain sebagai bentuk sosialisasi acara-acara tersebut juga merupakan suatu kegiatan wajib yang harus dilakukan demi terjalinnya hubungan yang intens antara calon legislatif sendiri dengan calon pemilih. Terkait program-program yang dilakukan oleh BMI sendiri hampir setiap kegiatan dana yang dikeluarkan merupakan dana

sendiri dari BMI seperti yang tertuang di dalam anggaran dasar. Seperti yang telah diutarakan oleh Bapak Eko selaku sekretaris BMI kota Yogyakarta.

“Walaupun Banteng Muda Indonesia adalah sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bukan berarti bahwa setiap kegiatan harus menyangandarkan diri pada induknya, akan tetapi hal ini sudah diatur dalam Anggaran Dasar BMI pada BAB XIII Harta Kekayaan, Pasal 31 tentang Harta Benda. Kekayaan Organisasi (BMI) terdiri dari Harta benda tidak bergerak, harta benda bergerak dan surat-surat berharga. Sumber kekayaan organisasi bersumber dari iuran anggota, usaha-usaha penggalangan dana yang dilakukan organisasi dan sumbangan dermawan yang tidak mengikat organisasi BMI. Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya dalam pembinaan dan rekrutmen generasimuda BMI selaku berupaya sendiri melalui sumber-sumber tadi.”

2. Rekrutmen politik

Rekrutmen politik merupakan seleksi dan pemilihan, atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan khususnya pada pemerintahan. Dalam organisasi sayap partai BMI proses perekrutan untuk menjadi anggota pun memiliki syarat-syarat sebagai berikut sesuai dengan ADRT : a. Warga negara Indonesia b. Mendaftarkan dengan mengisi formulir anggota yang meliputi (biodata singkat, pernyataan setuju terhadap azas, tujuan dan piagam perjuangan) Janji untuk memenuhi hak

dan kewajiban c. Menyerahkan KTP dan bersama formulir tersebut diatas. Sudah menjadi anggota dari organisasi sayap partai BMI belum berarti menjadi anggota partai PDIP.

Apabila ingin menjadi anggota partai maka harus mengikuti struktural partai .seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak alfin salah satu anggota pengurus partai dari anggota sayap partai BMI. “Untuk menjadi anggota partai biasanya dari awal diwajibkan untuk ikut sebagai simpatisan dan aktif berkontribusi selama minimal 6 tahun dalam konteks ini boleh melalui sayap partai. Setelah itu senior dari partai akan menunjuk anggota tersebut untuk mengisi formulir sebagai calon anggota struktur partai dengan jabatan awal sebagai anggota anak ranting. Apabila dalam jangka waktu 5 tahun itu predikatnya baik, maka tahun ke 6 naik ke ranting. Apabila predikatnya masih balance maka akan naik ke pengurus harian ranting. Apabila dalam jangka waktu 5 tahun ada predikat yang lebih baik lagi maka akan naik posisinya menjadi anak cabang dan seterusnya akan naik posisi di tingkat cabang dan diatasnya lagi ada DPD”.Begitu seterusnya sedangkan untuk dari anak ranting, ranting dan anak cabang sendiri melalui sistem kontribusi dimana yang menentukan adalah senior seperti dari cabang dan DPD.

Sedangkan untuk cabang dan DPD dengan melalui pertimbangan pusat.Sedangkan untuk mekanisme perekrutan untuk menjadi caleg sendiri selain dilihat dari predikat tetapi juga melalui skoring. Seperti yang bapak Fokky utarakan saat wawancara.Bapak Fokky merupakan salah satu

anggota DPRD Kota Yogyakarta terpilih dari organisasi sayap partai BMI. Beliau menjabat sebagai anggota DPRD dari periode 2009 hingga saat ini. Beliau sudah menjabat selama 2 periode dan pada tahun 2019 beliau akan mencalonkan kembali menjadi anggota legislatif di kota Yogya (incumbent). Selain itu Pak Fokky sendiri juga mengatakan bahwa “selain dari predikatnya rekrutmen sendiri juga menggunakan mekanisme skor dimana ada indikator-indikator tertentu yang mempengaruhi nilai atau skor tersebut, salah satunya adalah keterlibatan didalam organisasi sayap partai atau komunitas juang PDIP sendiri, contohnya apabila saya aktif menjadi pengurus anggota BMI maka otomatis saya akan mendapatkan skor. Yang artinya bahwa ketika bicara suksesi atau dalam tahap perekrutan disini saya sebagai komunitas juang di akomodir dalam sebuah skoring secara kuantitatif. Jadi saya harus selalu menambah skor untuk masuk kedalam penjangkaran calegnya”. Dari segi kepemimpinan partai DPD dan DPC ditentukan atas rapat dewan terpilih.

3. Partisipasi politik

Partisipasi merupakan kegiatan sebagai warganegara dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan ikut dalam menentukan seorang pemimpin dalam pemerintahan. Dalam konteks ini saya akan membahas partisipasi dari anggota DPRD dari BMI yang terpilih dan partisipasi masyarakat kota Yogyakarta sendiri. Menurut bapak Fokky “Ada tiga masalah penting yang sering di keluhkan oleh masyarakat kota Yogyakarta, yaitu mengenai lapangan pekerjaan, biaya hidup dan yang

terakhir adalah kesehatan terkait pelayanan BPJS.”Terkait masalah lapangan pekerjaan dari anggota dewan sendiri terbilang sulit untuk membuat kebijakan yang memuaskan masyarakat. Melihat bahwa di Kota Yogyakarta sendiri tidak ada Sumber Daya Alam yang dapat dimanfaatkan, selain itu Kota Yogyakarta juga bukan merupakan Kota Industri dan hanya mengandalkan sektor wisata dan budayanya saja.

Namun bukan berarti dengan tidak adanya SDA atau faktor-faktor di atas maka menghambat pembuatan kebijakan untuk mengatasi masalah lapangan pekerjaan. Kebijakan tersebut telah dibuat untuk mengurangi masalah lapangan pekerjaan seperti pelatihan gratis untuk para pekerja seperti supir, pegawai hotel dan UMKM. Pelatihan tersebut berdasarkan dengan keinginan para masyarakat contohnya adalah dengan memberikan pelatihan mengemudi dan pembuatan SIM gratis bagi masyarakat yang akan menjadi driver, dan dengan tumbuhnya perhotelan maka di buatlah pelatihan untuk menjadi karyawan hotel. Semua dilatih dan tanpa harus membayar bagi yang memiliki KTP kota Yogyakarta karena semua anggaran dibiayai oleh APBD Kota Yogyakarta. Untuk masalah biaya hidup sendiri masih terkendala dengan UMP yang masih rendah, daya beli yang masih rendah namun dengan adanya pelatihan-pelatihan gratis tersebut dan perekrutan pegawai baru sudah sedikit membantu keluhan masyarakat Kota Yogyakarta.

Sedangkan bentuk partisipasi masyarakat kota Yogyakarta sendiri yaitu dengan mengikuti pemilihan legislatif dan memilih calon wakil

rakyat sesuai dengan hati nurani masing-masing individu. Partisipasi dari masyarakat Yogyakarta cenderung besar dalam memilih calon wakil rakyatnya. Berikut adalah data mengenai tingkat partisipasi masyarakat kota Yogyakarta dalam pemilu anggota DPR, DPD, DPRD pada pemilu 2014. (tabel 3.1)

Berdasarkan data partisipasi pada table diatas yaitu data partisipasi pemilih di kota Yogyakarta pada tahun 2014 mencapai 75,88% data tersebut mencakup pemilihan DPR, DPD dan DPRD. Dapat disimpulkan bahwa pada pileg tahun 2014 tidak semua anggota masyarakat Yogyakarta atau daftar pemilih mengikuti pemilihan umum tersebut. Terlihat dari presentase diatas yang hanya menunjukkan 75,88%. Hal tersebut terjadi karena adanya kendala-kendala yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislative di Yogyakarta. Menurut KPU sendiri ada beberapa kendala yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya adalah petugas pemutakhiran data pemilih tidak melakukan pencocokan, dan petugas pemutakhiran sendiri tidak mencoret atau menghapus daftar pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat dan kadang tidak mencatat pemilih yang memenuhi syarat untuk terdaftar di daftar pemilih tetap, selain itu terjadi pula kendala yang terjadi di lapangan yaitu pada system informasi data pemilih dimana saat petugas pemutakhiran mengadakan sensus door to door ada beberapa pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat telah di coret atau di hapus tapi pada saat penetapan data pemilih sementara data tersebut muncul lagi.

B. Suksesi

Suksesi memiliki arti dan fungsi yang sangat penting dengan adanya proses suksesi maka suatu pemerintahan akan berjalan dan terus berlanjut. Dengan adanya pergantian atau perubahan dalam kepemimpinan maka rakyat dapat menilai bagaimana kinerja seorang pemimpin yang

sedang menjabat dan pemimpin sebelumnya. Sehingga masyarakat akan lebih teliti dan kompetitif dalam memilih calon pemimpinnya.

Sama halnya dengan suksesi legislatif, seorang anggota legislatif akan lengser apabila masa jabatan sudah habis dan akan di gantikan dengan anggota legislatif yang baru yang telah terpilih oleh masyarakat. Apabila seorang anggota legislatif tersebut memiliki kinerja yang baik maka akan tidak mungkin jabatannya lengser begitu saja dan biasanya akan terpilih kembali pada pileg selanjutnya. Disini masyarakat lah yang menilai bagaimana kinerja seorang anggota legislatif dan menentukan apakah proses suksesi tersebut terjadi atau tidak.

1. Mekanisme suksesi kepemimpinan

Suksesi kepemimpinan di dalam partai PDIP sendiri di mulai dengan naiknya anggota BMI menjadi anggota partai. Berbicara tentang suksesi sendiri banyak proses yang harus di tempuh oleh para anggota partai. Untuk menjadi calon anggota legislatif sendiri PDIP sangat selektif dalam memilih kadernya. Untuk memilih kader yang berpotensi PDIP sendiri telah membuat beberapa mekanisme. Salah satunya adalah skoring dimana skoring sendiri memiliki indikator-indikator yang harus di penuhi adalah keterlibatan anggota di dalam komunitas juang atau organisasi sayap partai. Pada setiap indikator memiliki jumlah skor yang berbeda-beda. Skor tersebut nantinya akan di akumulasikan saat akan penjarangan calon anggota legislatif. Berikut merupakan contoh data skoring dalam perekrutan calon anggota legislatif dari PDIP sendiri.

I. pengabdian di partai								
1	lama keanggotaan (tahun) tdk akumulatif				Nilai	Bobot	Jml periode	Jumlah
	1.1	$0 < x \leq 2$			20	1	1	
	1.2	$2 < x \leq 5$			40	1	1	
	1.3	$5 < x \leq 7,5$			60	1	1	
	1.4	$7,5 < x \leq 10$			80	1	1	
	1.5	$x > 10$			100	1	1	
2	jabatan di partai				jabatan bersifat akumulatif			
	2.1	Struktural partai			Nilai	Bobot	Jml periode	Jumlah
		2.1.1	DPP partai		100	3		
		2.1.2	DPD partai		80	3		
		2.1.3	DPC partai		60	3		
		2.1.4	PAC partai		40	3		
		2.1.5	ranting partai		20	3		
		2.1.6	anak ranting partai		10	3		
	2.2	lembaga-lembaga pendukung structural partai						
	2.2.1	di tingkat Pusat			Nilai	Bobot	Jml periode	Jumlah
		2.2.1.1	Deperpu		75	2		
		2.2.1.2	badab-badan partai		75	2		
		2.2.1.3	Departemen partai		75	2		

		2.2.1.4	TKMH/ mega center /mega prabowo			75	2		
		2.2.1.5	Sayap partai **			75	2		
		2.2.1.6	desk pilkada			75	2		
		2.2.1.7	Secretariat partai			50	2		
		2.2.1.8	MPP			75	2		
		2.2.1.9	Anggota MPR/DPR			75	2		
		2.2.1.10	Anggota DPD			50	2		
		2.2.1.11	Tenaga ahli DPR-RI			25	2		
	2.2. 2	di tingkat provinsi				nilai	bobo t	Jml periode	Jumla h
		2.2.2.1	Deperda			50	2		
		2.2.2.2	badan-badan partai			50	2		
		2.2.2.3	Departemen partai			50	2		
		2.2.2.4	TKMH/ mega center /mega prabowo			50	2		
		2.2.2.5	Saya partai **			50	2		
		2.2.2.6	desk pilkada			50	2		
		2.2.2.7	Sekretariat partai			25	2		
		2.2.2.8	Anggota DPRD provinsi			50	2		
		2.2.2.9	Tenaga ahli DPRD provinsi			15	2		
	2.2. 3	di tingkat kabupaten/kota				nilai	bobo t	Jml periode	jumlah h
		2.2.2.1	depercab			25	2		

		2.2.2.2	badan-badan partai			25	2		
		2.2.2.3	Departemen partai			25	2		
		2.2.2.4	TKMH/ mega center /mega prabowo			25	2		
		2.2.2.5	Sayap partai **			25	2		
		2.2.2.6	desk pilkada			25	2		

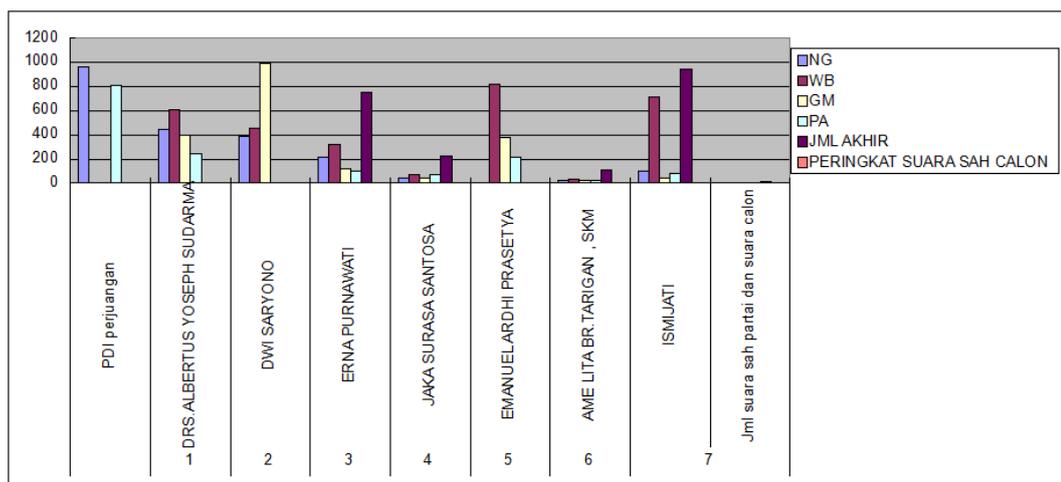
Dari data-data diatas dapat kita lihat bahwa para calon anggota partai akan terjaring dalam tahap pemilihan calon anggota legislatif dengan mempertimbangkan skor-skor yang telah di dapatkan. Data-data diatas merupakan sedikit contoh penilaian skoring pada penjaringan partai, untuk data yang selanjutnya penulis telah lampirkan pada LAMPIRAN. Pada setiap sub yang ada dalam formulir data skoring memiliki bobot nilai yang berbeda-beda contohnya yang paling mudah adalah pada jenjang pendidikan yang di tempuh oleh para anggota calon legislatif. Calon yang berjenjang pendidikan S1,S2,S3 memiliki nilai 100, sedangkan pada jenjang pendidikan AKADEMI/DIPLOMA mendapatkan nilai 75, dan pada jenjang pendidikan SLTA mendapatkan nilai 50. Bagi anggota yang memenuhi kriteria dan telah terjaring sebagai anggota calon legislatif maka akan di daftarkan dalam pemilu yang akan berlangsung. Selain dengan menggunakan scoring dari partai sendiri memiliki cara perekrutan secara obyektif yaitu dengan cara setiap anggota mengikuti kegiatan kepartaian contohnya apabila ada suatu kegiatan kemanusiaan atau kegiatan peringatan hari-hari nasional, selain itu dari

bacaleg sendiri memang yang pertama harus masuk pada structural partai, apabila dari tingkat pengurus anak cabang dia harus menjadi ketua terlebih dahulu atau perangkat yang lain yang mana diusung oleh ketua dari pengurus anak cabang. Apabila setingkat pengurus DPC dia harus KSB ketua sekretaris bendahara dari DPC dan untuk skala DPD adalah ditentukan menurut berapa lama dia di berada di PDIP.

Untuk selanjutnya calon anggota legislatif dari partai harus melalui mekanisme pemilu. Yaitu calon anggota legislatif yang memiliki suara terbanyak maka akan menjadi anggota dewan pada setiap dapilnya. Berikut merupakan contoh data perolehan suara calon anggota legislatif dari BMI pada tiap dapil.

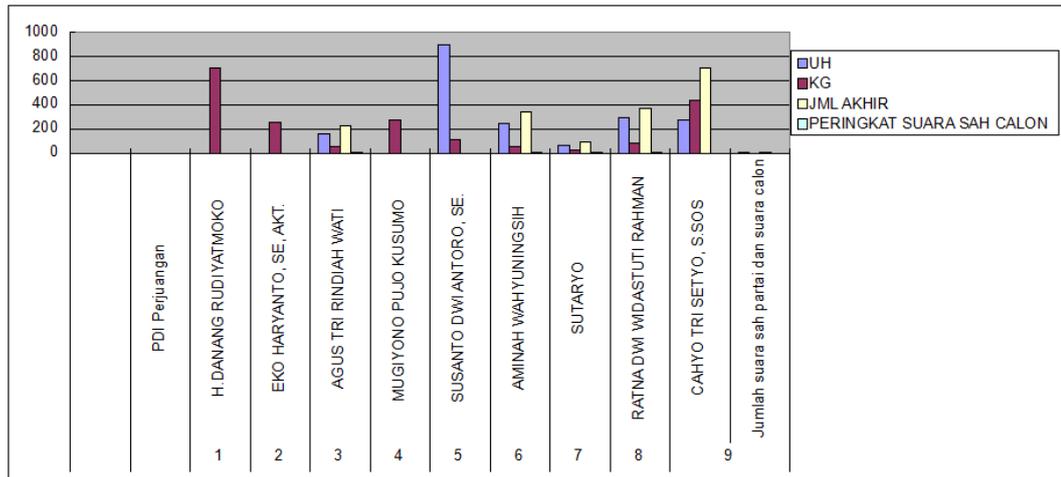
Perolehan suara dapil 2

Diagram 3.1 Perolehan Suara Dapil 2



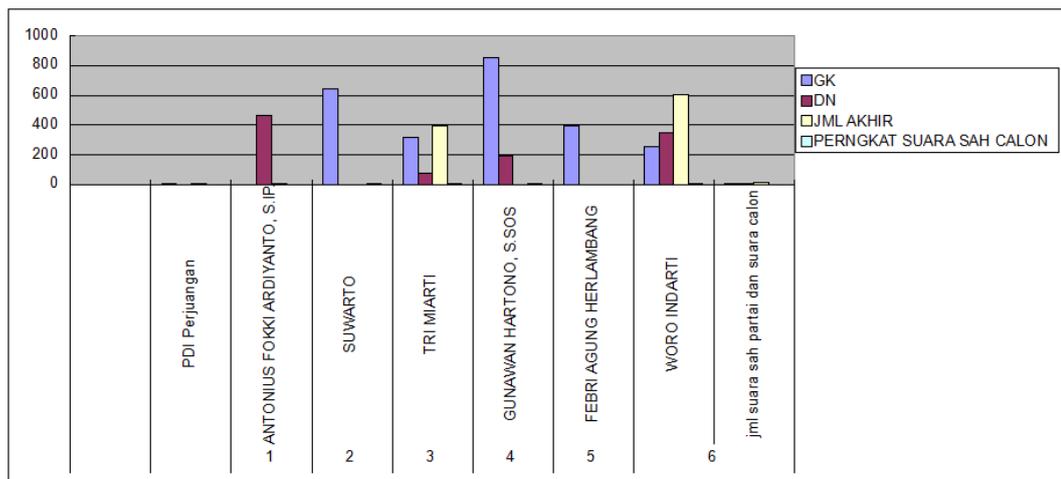
Perolehan suara dapil 3

Tabel 3.2 Perolehan suara Dapil 3



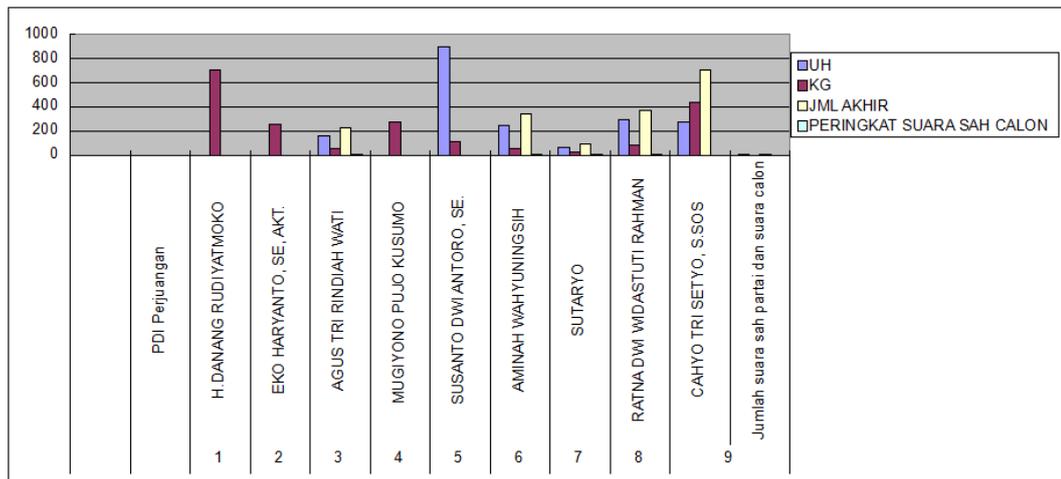
Perolehan suara dapil 4

Tabel 3.4 Perolehan Suara Dapil 5



Perolehan suara dapil 5

Tabel 3.6 Perolehan Suara Dapil 6



Data-data diatas merupakan rincian perolehan suara yang di dapatkan calon anggota legislatif pada tiap dapil. Disini penulis hanya mencantumkan tabel dimana terdapat anggota BMI yang mendapatkan suara terbanyak di setiap dapilnya. Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa calon anggota legislatif terpilih yang berasal dari anggota BMI hanya terdapat pada dapil 2 hingga dapil 4. Ada beberapa calon anggota legislatif yang berasal dari anggota BMI mendapatkan suara terbanyak pada setiap dapilnya. Beberapa calon yang mendapatkan suara terbanyak pada setiap calon diantaranya bapak Dwi Saryono mendapatkan suara terbanyak pada pada dapil 2 sebanyak 3.733 suara. Dan di posisi kedua adalah bapak Emanuel Ardi Prasetyo dari dapil 2 dengan memperoleh suara sebanyak 2.665. Sedangkan pada dapil 3 bapak deddy setyawan yang menduduki posisi ketiga dengan jumlah suara sebanyak 2.275. Dari dapil 4 bapak

Fokki menduduki peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 2.999 dan yang terakhir dari dapil 5 menduduki posisi kedua bapak Mugiyono Pujo Kusumo dengan perolehan suara sebanyak 1.738. Jadi dapat kita lihat dari data di atas anggota calon dari partai PDIP yang berasal dari BMI memiliki eksistensi yang kuat dan dapat memperoleh suara yang terbilang cukup banyak dan dapat menempati posisi teratas.

2. Dampak suksesi kepemimpinan

Dampak sendiri merupakan suatu akibat yang ditimbulkan dari sebuah kejadian. Dalam konteks ini penulis akan membahas tentang dampak dari suksesi kepemimpinan yang dirasakan oleh masyarakat maupun oleh calon legislatif atau dari partai pengusung sendiri. “Bagi partai sendiri dampak positif dari suksesi kepemimpinan yaitu adanya regenerasi anggota legislatif yang baru yang nantinya akan membuat kebijakan dan memiliki ideologi-ideologi yang segar”. Seperti yang telah diungkapkan oleh bapak Fokky. Bagi masyarakat sendiri salah satu dampak positif suksesi adalah dengan pergantian anggota legislatif maka masyarakat akan memiliki harapan yang tinggi untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang sebelumnya permasalahan di dalam kalangan masyarakat tersebut belum teratasi.

Serta masyarakat akan semakin aktif dalam berpartisipasi dalam memilih calon anggota dewan yang mana akan mewakili aspirasi-aspirasi mereka. Selain dampak positif tentunya adapula dampak negatifnya. Dalam

wawancara ini Bapak Fokky juga mengungkapkan dampak negatif dari suksesi sendiri “Dampak negatif bagi partai sendiri adalah adanya konflik internal antar calon anggota partai yang di sebabkan juga oleh sistem pemilu, dengan adanya system pemilu proporsional terbuka maka akan membuat perselisihan antar anggota partai atau di internal partai.” Sedangkan dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat sendiri adalah dengan adanya rasa tidak percaya lagi terhadap janji-janji atau program-program yang di tawarkan oleh anggota legislatif. Dilihat dari kinerja yang buruk dari anggota terpilih sebelumnya.

C. Petahana

Biasanya kandidat incumbent seorang anggota legislatif akan sangat mudah untuk terpilih. Dengan menggunakan nama popularitasnya dan apabila seorang incumbent tersebut berangkat dari partai yang memiliki masa yang besar maka akan sangat mudah incumbent tersebut untuk menang. Di Yogyakarta sendiri PDIP merupakan partai yang terbilang menguasai setiap dapil. Dimana hampir setiap dapil terdapat anggota legislatif yang berangkat dari partai PDIP. Namun seorang incumbent tidak sepenuhnya memiliki jalan yang mulus apabila kinerja selama menjabat buruk. Untuk memperkuat data atau tulisan yang telah dibuat maka penulis mewawancarai salah satu incumbent yang telah menjabat dari tahun 2009 dan akan mencalonkan lagi pada tahun 2019 yaitu bapak Fokky.

1. Kampanye permanen

Seorang kandidat incumbent secara teknis sangat menguntungkan dilihat dari popularitasnya selama dia menjabat sebagai seorang anggota dewan. Dimana masyarakat secara tidak langsung sudah sangat familiar dengan nama calon incumbent tersebut. Banyak cara dalam mempromosikan calon incumbent dalam masa kampanye, tidak jarang para incumbent melakukan kampanye permanen yaitu dengan melakukan kampanye atau promosi dengan menggunakan cara yang sama dengan menggunakan program-program yang telah terimplementasi. Seorang incumbent setidaknya telah menguasai berbagai opini serta keluhan-keluhan publik yang menjadi permasalahan. Sehingga akan sangat mudah menyampaikan materi kampanye kepada masyarakat.

Banyak cara yang dilakukan dalam masa kampanye seperti yang dilakukan oleh Bapak Fokky yang telah menjabat dari periode 2009 sampai saat ini dan akan menjadi salah satu calon incumbent pada tahun 2019. Beliau mengemukakan bahwa “ salah satu cara kampanye yang saya lakukan adalah berkumpul bersama masyarakat kota Yogyakarta sendiri, dalam konteks ini ya seperti makan bersama rakyat, minum bersama rakyat, bekerja bersama rakyat, itu adalah salah satu kunci yang saya lakukan. Karena dengan berkumpul dengan masyarakat maka saya akan mendengarkan segala keluhan kesah masyarakat, sehingga saya akan mengetahui solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Nah setelah mengetahui solusi-solusi untuk mengatasi masalah-masalah

yang ada dalam masyarakat maka akan di buat kebijakan”. Selain itu pak Fokky juga melakukan gerakan pembasisan seperti yang telah diungkapkan “selain melakukan terjun langsung ke masyarakat saya juga melakukan gerakan pembasisan. Seperti yang sudah saya lakukan pada kampanye sebelumnya. Gerakan pembasisan itu adalah gerakan dimana kita mengorganisir rakyat dalam dua organisasi. Disini ketika bicara tentang sayap contohnya BMI bagaimana kita membentuk BMI di tingkat kampung-kampung. Nah dari situ menjadi jejaring bagi kita untuk mengkampanyekan ide gagasan kita, untuk mengkampanyekan siapa kita, untuk mengkampanyekan jejak rekam kita dan yang terakhir untuk menggali aspirasi masyarakat.”

Disini dapat disimpulkan bahwa calon petahana ini melakukan kampanye dengan cara terjun langsung di dalam masyarakat sehingga dapat secara langsung mendengar keluhan kesah masalah-masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat itu sendiri. Dengan menggunakan pendekatan atau sosialisasi seperti itu maka nantinya para calon akan lebih mudah dalam membuat kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi tersebut.

2. Budaya masyarakat

Tidak selamanya masyarakat di Indonesia ini selalu terpengaruh dengan budaya *money politic* salah satu contohnya adalah di Kota Yogyakarta sendiri. Pada masa yang sudah terbilang modern ini masyarakat terbilang cukup pintar dalam mensiasati *money politic*. Masyarakat cenderung sudah kritis dan selektif dalam memilih calon anggota dewan yang nantinya akan mewakili aspirasinya. Apabila masih ada calon yang menggunakan *money politic* maka masyarakat akan menerima tetapi tidak untuk memilih kandidat tersebut apabila dirasa kandidat tersebut kurang layak. Kota Yogyakarta cenderung tidak *money politic*, masyarakat Kota Yogyakarta cenderung mandiri di dalam menentukan pilihan calon anggota legislatifnya.

Menurut penjelasan Pak Fokky sendiri mengenai fenomena *money politic* sendiri adalah sebagai berikut. “masyarakat kota Yogyakarta cenderung sudah pandai dalam menentukan calon wakil rakyatnya, saya bisa mengatakan hampir tidak ada *money politic* di Kota Yogya ini. Secara rasionalnya di Kota Yogyakarta ini kan “kota” maka tidak ada pilkades, sedangkan biasanya *money politic* itu sangat kencang di tingkat kabupaten atau di desa-desa, salah satu yang membentuk karakter *money politic* itu adalah adanya pilkades. Sedangkan di kota Yogyakarta tidak ada desanya.”

Jadi menurut penuturan bapak fokky sendiri tingkat *money politic* di kota Yogyakarta sendiri cenderung rendah, selain masyarakat dikota

Yogyakarta sudah cenderung modern dan cerdas, juga karena tidak adanya budaya yang membentuk money politic itu berkembang. Seperti yang telah di sampaikan diatas budaya money politic tidak dapat berkembang di kota Yogyakarta dikarenakan tidak adanya pilkades yang notaberne pilkades sendiri merupakan awal mula lahirnya money politic. Beliau juga mengatakan bahwa “untuk money poltik sendiri saya sangat tidak setuju karena selain merusak moral generasi bangsa juga dapat menodai etika demokrasi yang telah di banngun selama ini yaitu berdasarkan kejujuran dan keadilan”.

Sedangkan menurut pendapat dari bapak Alfin salah seorang anggota BMI menuturkan bahwa “tidak dapat dipungkiri money politic di kota Yogyakarta pasti ada terjadi transaksi money politic sama dengan kota atau provinsi yang lain. Karena tradisi money politic dianggap sebagai salah satu jurus jitu dalam kemenngan bagi para calon pemimpin dimanapun tempatnya. Contohnya adalah pada pemilihan walikota Yogyakarta tahun 2017 kemarin. Banyak terjadi money politic dengan jumlah nominal yang berbeda-beda. Sedangkan untuk pemilihan legislative sendiri mungkin ada tapi cenderung tidak dapat atau susah untuk di deteksinya. Karena nominalnya juga pasti tidak banyak.” Bapak Alfin juga menuturkan bahwa beliau sangat tidak setuju dengan adanya money politic seperti yang telah beliau sampaikan “sangat disayangkan apabila demokrasi kita sudah tercoreng kemurniannya dengan money politic yang menurut saya sudah menjadi budaya, sehingga dengan adanya

praktek tersebut masyarakat juga mulai resah untuk memperjuangkan secara murni calon yang mereka dukung sdengan modal kerja nyata saja. Bahkan ada sebagian dari masyarakat kita yang menilai bahwa proses berjalannya pemilihan umum adalah ladang rejeki. Banyak diantara pelaku money politic yang tidak mempertimbangkan efek kedepannya, yaitu pengembalian modal kampanye yang berimbas pada ranah pidana (korupsi).

3. Media dan opini publik

Salah satu hal yang paling penting dan memiliki pengaruh yang besar di dalam dunia politik adalah media serta opini publik. Dengan adanya media maka akan dengan mudah menggiring opini publik kedalam situasi yang di inginkan. Ada dampak positif dan negatif terkait dengan adanya media ini. Salah satu dampak positif dengan adanya media yaitu masyarakat akan dengan mudah memperoleh informasi mengenai ranah politik maupun isu-isu yang terjadi pada saat ini. Dengan adanya media juga sangat berpengaruh bagi partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.

Namun selain dampak positif ada juga dampak negatif dari media tersebut, slah satunya adalah adanya berita bohong atau hoax. Dengan adanya berita hoax tidak jarang akan terjadi perselisihan atau perpeccaran anar anggota masyarakat. Disini peran masyarakat sangat penting dalam

menyikapi hoax, masyarakat harus pandai memilih dan memilah informasi yang benar dengan cara tidak hanya membaca dan menelan mentah mentah suatu berita. Menurut Bapak Fokky sendiri media memiliki pengaruh yang cukup besar besar “media memiliki pengaruh yang lumayan besar, karena masyarakat Kota Yogyakarta ini juga gemar membaca media dan juga haus akan informasi apalagi mengenai isu-isu politik. Dengan kondisi seperti itu maka media adalah sumber informasi yang sangat penting untuk dimanfaatkan untuk membangun citra di masyarakat”.

Salah satu berita atau isu yang mempengaruhi terpilihnya kembali Bapak Fokky adalah tentang kebijakan-kebijakan yang telah terimplementasi seperti kebijakan JAMKESDA atau JPD. Dimana jamkesda sendiri di danai oleh APBD kota Yogyakarta. Sehingga masyarakat akan lebih ringan dalam membayar biaya kesehatan.

D. Sistem Pemilu

Pemilu pada setiap periode selalu mengalami perubahan baik dari sistem maupun dari mekanismenya. Seperti yang telah saya bahas di bab sebelumnya bahwa sistem pemilu di Indonesia cenderung mengalami perubahan. Pada pemilu tahun 1999 menggunakan sistem proporsional dengan daftar tertutup sedangkan pada tahun 2004 sampai sekarang cenderung menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka. Masing-masing dari sistem tersebut memiliki keunggulan dan

kelemahan bagi calon anggota legislatif maupun bagi masyarakat.

Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak fokky “ kalau menurut pandangan saya, saya cenderung mengkritisi sistem ini karena muncul pertanyaan apakah dengan sistem ini dapat mempererat perstuan bangsa atau malah memperlebar integrasi bangsa? Karena menurut saya dengan adanya sistem ini apabila tidak disikapi secara dewasa makan akan berpotensi terjadinya konflik di masyarakat, karena dengan menggunakan suara terbanyak biasanya akan ada konflik antar caleg dari satu partai dan itu biasanya para para pemilih atau pendukung juga ikut berkonflik. Karena ya itu tadi dengan suara terbanyak maka saya harus mengalahkan pasangan nomor irut yang lain. Maka akan timbul pertanyaan lagi apakah ini strategi untuk mereduksi konflik antar partai menjadi konflik antar caleg di dlam tubuh partai sendiri ?tapi faktanya dalam sistem ini konflik yang lebih tajam adalah di dalam internal partai. Namun keuntungannya sendiri selain semakin demokratis setiap caleg akan berlomba-lomba “menjual” dirinya.”

Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa dengan adanya sistem pemilu dafrat terbuka tidak selalu di sambut baik oleh para anggota partai atau oleh para calon anggota legislatif.Diihat dari yang telah di sampaikan oleh bpak fokky bahwa beliau memiliki kritik terhadap sistem pemilu daftar terbuka ini.salah satu yang mempengaruhi adanya kritik tersebut adalah dengan adanya sistem ini maka tercipta konfik antar internal partai yang mana konflik tersebut akan memecah belah internal partai. Namun

sistem ini juga memiliki impact yang positif yaitu dengan menggunakan sistem ini maka para calon anggota dapat dengan mudah mempromosikan dirinya, selain itu dengan adanya sistem pemilu daftar terbukayang tidak menggunakan nomor urut partai maka antara anggota calon legislatif dan calon pemilih biasanya akan lebih dekat dan cenderung akan memudahkan calon anggota legislatif.